



Analisis Dampak Penempatan Dana Rp200 Triliun: Fokus pada Peran BSI dalam Mendorong Sektor Riil dan Industri Halal

Rendi kurniawan, Lutfiya, Nazila Lailatul fitria, Ro'is Affandy Firstantyo

Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Diterima: 16 Oktober 2025 ; Published: 25 Mei 2026

ABSTRACT

This study analyzes the impact of the Rp200 trillion government fund placement in 2025 with a focus on the strategic role of Bank Syariah Indonesia (BSI) in strengthening the real sector and the halal industry. Using an exploratory approach combining qualitative descriptive and documentary analysis with simple quantitative simulation through the Keynesian Multiplier model this research explores how government stimulus and Islamic finance intermediation may create economic multiplier effects. The simulation indicates that if the Rp200 trillion fund were effectively distributed through productive and halal based sectors, particularly by BSI as the largest Islamic financial institution, it could theoretically generate up to a fourfold multiplier on GDP growth (assuming an MPC of 0.75), increase MSME productivity, and accelerate Indonesia's transformation toward a global halal economy. These figures are conditional projections dependent on the underlying assumptions rather than empirical measurements. The study concludes that synergy between government financial policy and Islamic financial intermediation plays a pivotal role in realizing sustainable and inclusive economic growth.

Keywords: BSI; halal industry; multiplier effect; Islamic finance.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak penempatan dana sebesar Rp200 triliun pada tahun 2025 dengan fokus pada peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperkuat sektor riil dan industri halal. Menggunakan pendekatan eksploratif yang memadukan analisis deskriptif kualitatif dan dokumenter dengan simulasi kuantitatif sederhana melalui model Keynesian Multiplier, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana stimulus pemerintah dan intermediasi keuangan syariah dapat menciptakan efek berganda ekonomi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa apabila penempatan dana Rp200 triliun disalurkan secara efektif ke sektor-sektor produktif berbasis halal melalui BSI sebagai lembaga keuangan syariah terbesar, maka secara teoretis berpotensi menghasilkan pengganda ekonomi hingga empat kali lipat terhadap PDB dengan asumsi MPC sebesar 0,75, meningkatkan produktivitas UMKM, serta mempercepat transformasi Indonesia menuju pusat ekonomi halal global. Angka-angka tersebut merupakan proyeksi bersyarat, bukan hasil pengukuran empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara kebijakan pengelolaan keuangan negara dan intermediasi keuangan syariah berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata kunci: BSI; industri halal; efek multiplier; keuangan Islam



How to cite:

Kurniawan, Rendi Lutfiya, Nazila Lailatul fitria, Ro'is Affandy Firstantyo (2026). Analisis Dampak Penempatan Dana Rp200 Triliun: Fokus pada Peran BSI dalam Mendorong Sektor Riil dan Industri Halal *Journal of Economics Development Issues, Vol9 (no.1)*, pp 76-88
<https://doi.org/10.33005/jedi.v5i2.93>.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Salah satu fenomena yang sempat menjadi sorotan besar di ruang publik ialah wacana dana Rp200 triliun yang ramai diperbincangkan di berbagai media, yang pada perkembangannya terkonfirmasi sebagai kebijakan penempatan dana negara dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sejumlah bank milik negara (Keuangan & Indonesia, 2025). Wacana ini memicu beragam pertanyaan mengenai transparansi, tata kelola keuangan negara, serta efektivitas sistem pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Setelah dipastikan bahwa dana tersebut merupakan penempatan likuiditas pemerintah pada perbankan nasional, perhatian bergeser pada bagaimana dana itu dapat dimanfaatkan secara produktif. Peristiwa ini mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan ekonomi nasional, khususnya terkait kepercayaan publik, akuntabilitas, serta integritas lembaga-lembaga ekonomi dan pemerintahan.

Penempatan dana Rp200 triliun ini menggambarkan bagaimana mobilisasi dana besar oleh negara dapat menimbulkan implikasi ekonomi, sosial, bahkan politik yang signifikan. Apabila dana sebesar itu dikelola secara produktif, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional tentu sangat besar, misalnya dalam bentuk peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sektor UMKM, serta pengentasan kemiskinan (Kompas, 2025). Sebaliknya, efektivitas dana tersebut sangat bergantung pada kekuatan sistem verifikasi, pengawasan, dan tata kelola keuangan publik; kelemahan pada aspek-aspek tersebut dapat menjadi indikasi bahwa fondasi tata kelola ekonomi bangsa masih membutuhkan perbaikan mendasar.

Situasi ini kemudian mengarahkan perhatian pada pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan spiritual. Dalam konteks ini, ekonomi syariah muncul sebagai paradigma alternatif yang menawarkan pendekatan menyeluruh terhadap pengelolaan ekonomi. Ekonomi syariah menegaskan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keadilan sosial, menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta keberlanjutan, dan menolak praktik-praktik yang bersifat spekulatif, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi atau taruhan) (Alda Julianti, Lena Hirmawati, & Herlina Yustati, 2024). Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berperan sebagai sistem keuangan, melainkan juga sebagai sistem nilai yang menuntun perilaku ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks nasional, penerapan prinsip ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah berupaya memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama sistem keuangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah monumental adalah pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun

2021, hasil penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (Ulfa, 2021). Kehadiran BSI tidak hanya menjadi simbol penguatan sektor keuangan syariah di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih etis, inklusif, dan berkeadilan.

BSI memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem keuangan nasional. Selain menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan skala aset yang luas, BSI juga berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Melalui berbagai produk dan layanan berbasis prinsip syariah, BSI diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, memperkuat sektor usaha kecil dan menengah, serta berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional dari potensi krisis global. Dalam konteks tata kelola ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, BSI juga diharapkan dapat menjadi contoh nyata penerapan nilai moral dan etika dalam sistem ekonomi modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penempatan dana Rp200 triliun bukan hanya persoalan administratif atau finansial semata, melainkan juga refleksi dari perlunya pembenahan nilai dan etika dalam sistem ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi jawaban atas berbagai kelemahan yang masih terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Oleh sebab itu, penelitian mengenai keterkaitan antara penempatan dana Rp200 triliun, sistem ekonomi nasional, penerapan ekonomi syariah, serta peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memperkuat sistem keuangan berbasis syariah menjadi penting untuk dilakukan secara ilmiah, mendalam, dan komprehensif.

KAJIAN LITERATUR

Intermediasi Keuangan Syariah

Intermediasi keuangan merupakan fungsi utama lembaga keuangan, termasuk bank syariah, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Dalam konteks ekonomi Islam, intermediasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan sosial (Rahmani, 2015).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, BSI berperan sebagai penghubung antara investor dan sektor riil dengan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan (Hasyim, 2016).

Dengan sistem intermediasi yang berbasis syariah, bank tidak hanya bertugas menyalurkan modal, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor-sektor produktif. Pendekatan ini menjadikan sistem keuangan syariah lebih berorientasi pada aktivitas ekonomi riil yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Multiplier Effect

Konsep multiplier effect menjelaskan bagaimana suatu kebijakan ekonomi dapat memberikan efek pengganda terhadap sektor lain. Dalam ekonomi Islam, efek pengganda ini dapat tercipta melalui penyaluran dana produktif seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), zakat, hibah, serta dana sosial lainnya. Ketika dana tersebut digunakan untuk

kegiatan produktif, maka akan mendorong peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Nasrullah, 2021)

Bank syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan multiplier effect melalui pembiayaan sektor riil. Pembiayaan yang disalurkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi lainnya seperti distribusi, konsumsi, dan ekspor. Dengan demikian, keberadaan BSI dan penempatan dana Rp200 triliun dapat menciptakan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya pada sektor halal dan UMKM.

Peran Bank Syariah

Bank syariah memiliki posisi penting sebagai motor penggerak sektor riil dalam sistem ekonomi nasional. Melalui fungsi intermediasi keuangannya, bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, manufaktur, dan industri halal. Menurut (Endah Mudiyyatul Kustinah & Fauzatul Laily Nisa, 2024), pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki dampak signifikan terhadap penguatan industri halal karena selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai keberkahan ekonomi.

BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berperan penting dalam memperkuat ekosistem halal nasional melalui pembiayaan berbasis nilai Islam. Peran ini tidak hanya mencakup pembiayaan usaha, tetapi juga menciptakan inovasi produk keuangan yang mendukung rantai pasok halal, seperti pembiayaan ekspor produk halal dan penguatan UMKM berbasis syariah (Suretno & Al Hidayah Bogor, 2022).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, bank syariah juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan (Sandra Dewi, Yaswirman, Helmi, 2023) yang menegaskan bahwa bank syariah berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tingkat usaha, faktor-faktor produksi turut menentukan kinerja sektor riil; penelitian terhadap industri kecil dan menengah menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha (Yudha & Setiawan, 2023).

Penempatan Dana Pemerintah pada Perbankan

Secara konseptual, perlu dibedakan antara penempatan dana dan penempatan dana pemerintah. Dana hibah merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan tanpa kewajiban pengembalian, biasanya bertujuan mendukung kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, atau kemanusiaan. Sementara itu, penempatan dana (placement) adalah penyimpanan dana milik negara pada perbankan sebagai instrumen pengelolaan likuiditas; dana ini tetap menjadi milik negara dan bersifat sementara. Dana Rp200 triliun yang menjadi objek penelitian ini secara teknis merupakan penempatan dana negara dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), bukan hibah dalam pengertian klasiknya. Meskipun demikian, kajian mengenai pemanfaatan dana hibah tetap relevan sebagai kerangka acuan, karena keduanya sama-sama berfungsi sebagai stimulus yang diharapkan memperkuat kinerja sektor riil melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, terutama BSI.

Penyaluran dana yang tepat sasaran dapat mendorong pertumbuhan sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini sejalan dengan prinsip intermediasi syariah yang menekankan distribusi keadilan ekonomi. Berdasarkan penelitian (Absarihim, 2024), pembiayaan berbasis syariah dan bantuan keuangan non-

komersial seperti hibah memiliki peran besar dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat dan menumbuhkan kegiatan produktif di tingkat akar rumput.

Melalui mekanisme penyaluran yang transparan dan berbasis prinsip syariah, penempatan dana ini tidak hanya menjadi alat stimulus ekonomi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kolaborasi antara kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan syariah seperti BSI akan menghasilkan sinergi yang berdampak luas bagi pembangunan sektor riil dan penguatan industri halal nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi eksploratif yang menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumenter dengan simulasi kuantitatif sederhana untuk memperkirakan potensi dampak ekonomi dari penempatan dana Rp200 triliun. Perlu ditegaskan bahwa komponen kuantitatif dalam penelitian ini bersifat estimatif dan ilustratif berupa simulasi terhadap model multiplier dengan menggunakan asumsi parameter tertentu, bukan analisis statistik inferensial atas data primer. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami konteks kebijakan, peran lembaga keuangan syariah (khususnya Bank Syariah Indonesia/BSI), serta arah pengembangan sektor riil dan industri halal di Indonesia tahun 2025–2026 (Riswanto, Dr.H. Abubakar, & Elin Rosalin, 2018). Data dikumpulkan melalui studi dokumenter, yakni penelusuran terhadap dokumen resmi pemerintah (seperti publikasi KNEKS, Kementerian Keuangan, OJK, dan BSI), berita ekonomi terkini, serta hasil riset akademik yang relevan dari Google Scholar.

Sementara itu, simulasi kuantitatif sederhana digunakan untuk mengestimasi potensi multiplier effect dari penempatan dana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan sektor halal, dan penyerapan tenaga kerja. Perhitungan dilakukan menggunakan model Keynesian Multiplier dengan parameter yang bersumber dari data sekunder BPS, Bank Indonesia, dan laporan ekonomi syariah nasional. Pendekatan eksploratif ini dipilih karena fenomena penempatan dana Rp200 triliun baru terealisasi pada tahun 2025, sehingga belum banyak data empiris primer yang tersedia (Riswanto et al., 2018). Oleh karena itu, metode dokumenter dan simulasi kuantitatif menjadi strategi yang paling tepat untuk menjelaskan potensi dan arah dampak ekonomi secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penempatan Dana Rp200 Triliun

Sejak awal tahun 2025, pemerintah Indonesia melalui langkah fiskal dan kebijakan moneter yang bersinergi telah mengerahkan upaya luar biasa untuk meredam berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, termasuk tekanan inflasi, gangguan rantai pasok, dan perlambatan daya beli masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penempatan dana negara sebesar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sistem perbankan melalui bank-bank Himbara, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) (Investing, n.d.).

Penempatan dana sebesar Rp200 triliun ini diumumkan secara resmi pada 12 September 2025, di mana keempat bank terbesar (Mandiri, BRI, dan BNI) masing-masing menerima alokasi sebanyak Rp55 triliun, BTN mendapatkan Rp25 triliun, dan BSI sebanyak Rp10 triliun dari

keseluruhan total dana tersebut (Anggela, 2025). Pemerintah menyebut bahwa distribusi ini mempertimbangkan ukuran bank (size), kapasitas likuiditasnya, serta potensinya dalam menjangkau daerah-daerah yang selama ini mungkin kurang terlayani, termasuk akses ke provinsi seperti Aceh, di mana BSI dianggap memiliki keunggulan akses lokal dan jaringan syariah (Siswanto, 2025).

Tujuan utama dari kebijakan penempatan dana ini adalah memperkuat likuiditas perbankan nasional untuk mempermudah kredit atau pembiayaan sektor riil—termasuk UMKM dan industri halal—yang diyakini menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Harapannya, dengan suntikan dana ini, bank-bank Himbara bisa menyalurkan pembiayaan dengan biaya dana yang lebih rendah, tenor yang lebih feasible, serta mempercepat likuiditas di wilayah yang sebelumnya akses modalnya terbatas (Anggela, 2025).

Bukti awal pemanfaatan dana ini menunjukkan angka realisasi yang mulai menjanjikan. Per 9 Oktober 2025 kurang lebih satu bulan setelah dana dicairkan—serapan dari dana tersebut untuk Bank Mandiri tercatat mencapai sekitar 74%, BRI sekitar 62%, BNI 50%, BTN 19%, dan BSI 55% (Rianti, 2025). Ini menandakan bahwa walau bank-bank besar mampu menyerap lebih cepat sebagian dari dana, bank yang menerima alokasi relatif kecil seperti BSI juga menunjukkan mobilisasi dana yang signifikan dalam waktu singkat.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Pertama, meskipun dana telah disalurkan, belum semua bank mampu segera menyalurkan seluruh dana tersebut ke sektor produktif; sebagian masih dalam tahap pengaturan internal dan persiapan kredit. Kedua, mekanisme pengalokasian dana yang berbasis size bank dapat memunculkan isu keadilan akses khususnya bagi bank syariah yang mungkin memiliki jaringan lebih sempit atau modal lebih kecil dibanding bank konvensional besar. Ketiga, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang masuk, tetapi juga oleh instrumen pendukung seperti suku bunga kredit, persyaratan pinjaman, regulasi teknis, dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi UMKM atau industri halal yang layak pembiayaan.

Dalam kerangka waktu 2025-2026, penempatan dana ini diposisikan sebagai katalis untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus pendorong transisi ekonomi ke arah yang lebih berorientasi syariah dan halal. Pemerintah juga menetapkan target strategis seperti memperluas sertifikasi halal bagi UMKM dengan target tambahan sekitar 3,5 juta UMKM disertifikasi pada tahun 2025 serta memperkuat ekosistem halal agar produk halal Indonesia tidak hanya memenuhi standar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar ekspor internasional (Oswaldo, 2025).

Peran BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak didirikan sebagai hasil merger beberapa bank syariah pada 2021 telah mengambil posisi strategis sebagai aktor kunci dalam memperluas inklusi keuangan syariah dan mendukung sektor riil, khususnya UMKM dan industri halal. Menurut laporan internal dan publikasi resmi BSI, aset keuangan syariah nasional diperkirakan akan meningkat ke kisaran Rp 3.157,9-Rp 3.430,9 triliun pada tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi aset sebesar sekitar Rp 2.744 triliun pada September 2024, tumbuh sekitar 11,9% secara tahunan. Dalam konteks ini, BSI dianggap memiliki potensi dominan untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi keuangan dan sebagai penggerak dalam ekosistem halal (Banjaran, pernyataan BSI) (Bsi, 2025).

Salah satu bukti nyata dari peran tersebut adalah performa pembiayaan UMKM yang terus menunjukkan tren pertumbuhan. Pada semester pertama tahun 2025, BSI berhasil menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM sebesar Rp 49,6 triliun, naik sekitar 10,2% year-on-year (Datu, 2025). Selain itu, hingga Juni 2024 pembiayaan UMKM mencapai Rp 47,72 triliun dan meningkat 14,54% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Agustinus Rangga Respati, 2025). Angka-angka ini mendemonstrasikan bahwa BSI tidak hanya fokus pada pertumbuhan portofolio, tetapi juga fokus kepada pemerataan dan peningkatan kualitas pembiayaan, mengingat bahwa sebagian besar pembiayaan UMKM ini disalurkan ke kluster perdagangan, fashion, kerajinan, pertanian, dan food & retail, yang sebagian besar juga berkaitan erat dengan produk halal.

Selain besaran pembiayaan, BSI juga menekankan pentingnya pendampingan, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi non-keuangan sebagai bagian dari strateginya. Contohnya, BSI telah mendirikan UMKM Center di berbagai wilayah seperti Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, yang selain menjadi kanal pembiayaan juga pusat pelatihan, pembinaan usaha, dan konsultasi, termasuk konsultasi sertifikasi halal (Suheriadi, 2025). Melalui UMKM Center ini, BSI mengidentifikasi potensi usaha baru, membantu digitalisasi usaha, dan memperkuat kemampuan usaha agar dapat “naik kelas” tidak hanya dari segi skala usaha tetapi dari kemampuan administrasi, pemasaran, pembukuan, dan sertifikasi standar produk

Dalam menghadapi tantangan risiko kredit dan menjaga kualitas asetnya, BSI juga menunjukkan opini kepercayaan pasar dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) yang relatif rendah dan pengelolaan risiko yang selektif. Data semester I 2025 menunjukkan bahwa pembiayaan total yang disalurkan oleh BSI mencapai sekitar Rp 293 triliun, tumbuh 13,8% year-on-year. Dari angka tersebut, porsi pembiayaan UMKM adalah sekitar Rp 49,6 triliun. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa UMKM sebagai segmen yang sangat strategis tetap diperhitungkan dalam struktur pembiayaan BSI meskipun bank menghadapi tekanan kebutuhan likuiditas dan biaya dana yang mungkin meningkat akibat kondisi makro-ekonomi (Datu, 2025).

BSI juga memperluas produk dan layanan ekosistem syariah yang mencakup lifestyle halal, produk keuangan untuk ibadah (seperti tabungan haji), serta pendidikan Islam. Misalnya, per Mei 2025 dana kelolaan ekosistem Islam BSI telah mencapai sekitar Rp 13 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 12,81%. Komponen-komponen utama ekosistem ini adalah halal lifestyle, sociobusiness, serta organisasi Islam (Fajahriza, 2025). Produk berbasis tabungan emas (“BSI Emas”) juga mencatat kenaikan signifikan, termasuk pangsa pasar dalam tabungan haji, memperkuat posisi BSI bukan hanya sebagai penyedia produk keuangan konvensional, tetapi sebagai pusat ekosistem syariah yang tersambung langsung ke preferensi halal masyarakat (BSI, 2025).

Pada tahun 2025, BSI menetapkan target ambisius untuk meningkatkan pembiayaannya hingga Rp 310 triliun, yang mencerminkan kenaikan sekitar 16,54% dibandingkan angka pembiayaan di tahun 2024, yang mencapai Rp 266 triliun (ANTARA, 2025). Target ini menunjukkan bahwa BSI tidak sekadar fokus pada pertumbuhan volume, tetapi juga pada kecepatan dan keluasan penetrasi pembiayaan ke segmen yang lebih bawah dan wilayah yang lebih terpencil, sekaligus menjaga prinsip syariah dan kualitas produk.

Secara keseluruhan, peran BSI dalam penyaluran dan pembiayaan syariah mencakup beberapa dimensi penting: kuantitas pembiayaan (besar nominal dan pertumbuhan), pemerataan akses (wilayah dan skala usaha), peningkatan kapasitas non-keuangan (pendampingan, sertifikasi halal, digitalisasi), serta pembangunan ekosistem halal yang lebih luas. Kombinasi strategi ini

memperkuat argumen bahwa BSI bukan hanya penerima penempatan dana, tetapi juga sebagai medium strategis yang dapat memaksimalkan efek kebutuhan pembiayaan dan transformasi sektor riil dan halal, bila dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah dan dukungan regulasi yang memadai.

Sektor yang Terdampak

Salah satu fokus utama dari penempatan dana Rp200 triliun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2025 adalah untuk memperkuat sektor riil yang berorientasi pada ekonomi halal, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal serta industri halal nasional. Kedua sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2026, sebagaimana visi yang tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang kini diperpanjang dengan arah baru menuju 2030 oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM serta KNEKS, pada tahun 2024 Indonesia memiliki lebih dari 65,5 juta unit UMKM, dengan sekitar 17,3 juta di antaranya telah terafiliasi atau sedang bertransisi ke ekosistem halal baik dalam bentuk sertifikasi produk, bahan baku, maupun rantai pasok halal. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai sekitar 60,5%, sementara kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 97% dari total tenaga kerja nasional.

Masuknya dana Rp200 triliun diharapkan menjadi stimulus fiskal dan pembiayaan sosial yang mempercepat penguatan sektor ini melalui beberapa jalur utama: (1) peningkatan akses pembiayaan halal; (2) penguatan sertifikasi halal dan rantai nilai produksi; serta (3) integrasi UMKM ke dalam ekosistem halal nasional dan global. Dalam konteks ini, BSI berperan penting sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan syariah, baik dalam bentuk akad mudharabah (bagi hasil) maupun musyarakah (kemitraan modal), untuk memastikan bahwa penempatan dana tersebut benar-benar mendukung aktivitas produktif yang halal dan berdampak sosial tinggi.

Dampak langsung terhadap UMKM halal terlihat pada peningkatan akses terhadap modal berbasis syariah dan efisiensi produksi. Contohnya, pada tahun 2025 BSI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan KNEKS menargetkan sertifikasi halal bagi 3 juta produk UMKM baru, terutama pada subsektor makanan, minuman, fashion, dan kosmetik halal (Oswaldo, 2025). Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas pasar domestik dan ekspor halal Indonesia yang pada tahun 2024 tercatat sebesar US\$ 7,8 miliar dan diproyeksikan naik menjadi US\$ 9,2 miliar pada 2025 (IAEI, 2025).

Selain itu, sektor industri halal mengalami akselerasi signifikan karena adanya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan penempatan dana pemerintah. Sektor industri halal di Indonesia mencakup beberapa subsektor utama: makanan-minuman halal, fashion Muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pariwisata halal. Berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator 2024, Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia, naik dari posisi ke-4 pada 2023, dengan nilai kontribusi industri halal terhadap PDB mencapai Rp 1.154 triliun (IAEI, 2025).

Dengan adanya penempatan dana Rp200 triliun, peluang penguatan industri halal nasional meningkat secara signifikan. Sebagian alokasi dana diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri halal seperti Halal Industrial Park di Sidoarjo,

Bintan, dan Cikande, yang kini menjadi pusat integrasi produksi halal, logistik, dan sertifikasi. Kawasan ini dirancang untuk menjadi basis produksi halal berstandar internasional, memudahkan ekspor, serta memperluas akses pasar global. Dalam konteks ekonomi makro, penguatan sektor UMKM halal dan industri halal melalui penempatan dana dan peran BSI diharapkan menciptakan multiplier effect yang signifikan. Berdasarkan perhitungan model Keynesian sederhana, bila marginal propensity to consume (MPC) masyarakat diasumsikan berada di kisaran 0,75, maka multiplier dari injeksi Rp200 triliun secara teoretis akan menghasilkan peningkatan PDB sebesar Rp800 triliun (karena multiplier = $1/(1 - MPC) = 4$). Perlu dicatat bahwa angka empat kali lipat ini merupakan konsekuensi langsung dari asumsi MPC yang dipilih, bukan hasil estimasi empiris; nilainya akan berubah jika MPC yang digunakan berbeda. Selain itu, model multiplier Keynesian klasik mengasumsikan injeksi belanja yang permanen, sementara dana Rp200 triliun merupakan penempatan likuiditas yang bersifat sementara, sehingga estimasi ini lebih tepat dibaca sebagai potensi maksimum dalam skenario ideal. Dengan asumsi tersebut, injeksi dana berpotensi mendorong aktivitas ekonomi sektor halal secara signifikan melalui konsumsi, investasi, dan produksi, terutama jika dibarengi dengan digitalisasi ekosistem halal dan sinergi antar-lembaga keuangan syariah.

Namun, beberapa tantangan tetap muncul. Pertama, tidak semua UMKM mampu memenuhi persyaratan administrasi dan digitalisasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan syariah. Kedua, terdapat keterbatasan jumlah pendamping dan asesor halal yang dapat memproses sertifikasi dalam jumlah besar. Ketiga, terdapat kesenjangan literasi keuangan syariah, terutama di luar pulau Jawa, yang menghambat pemanfaatan dana tersebut secara optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara BSI, BPJPH, dan Kementerian Koperasi menjadi penting untuk memastikan penempatan dana tersalurkan secara tepat sasaran dan produktif. Ke depan, program seperti BSI UMKM Center dan BSI Halal Hub berpotensi menjadi katalis utama transformasi sektor halal nasional. Dengan dukungan penempatan dana dan infrastruktur keuangan syariah, UMKM halal dapat bertransformasi menjadi export-ready enterprises, terutama dalam produk makanan, kosmetik, dan modest fashion. Selain itu, peningkatan peran lembaga sertifikasi halal dan digitalisasi rantai pasok akan mempercepat penguatan daya saing industri halal nasional di kancah global, mendukung visi “Indonesia sebagai Global Halal Hub 2030.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM halal dan industri halal menjadi episentrum utama dari dampak positif penyaluran penempatan dana 200 triliun. Melalui dukungan intermediasi BSI dan kolaborasi lintas lembaga, kedua sektor ini bukan hanya memperkuat fondasi ekonomi syariah nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak transisi ekonomi Indonesia menuju sistem ekonomi halal yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

Analisis Multiplier Effect

Penyaluran penempatan dana sebesar Rp200 triliun pada tahun 2025 merupakan salah satu kebijakan fiskal ekspansif terbesar yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam dekade terakhir, dengan fokus utama pada penguatan sektor riil dan ekonomi halal. Analisis terhadap dampak multiplier dari kebijakan ini menjadi penting untuk menilai efektivitas alokasi dana, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM halal dan industri halal melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI).

1. Pendekatan Kualitatif : Efek Struktural dan Sosial Ekonomi

Dari sisi kualitatif, efek penyaluran dana tidak hanya berorientasi pada output ekonomi, tetapi juga pada perubahan struktural dalam sistem pembiayaan halal. Penempatan dana Rp200 triliun yang disalurkan sebagian melalui BSI berfungsi sebagai katalis bagi UMKM halal untuk memperoleh pembiayaan murah berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), sehingga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbunga dari sistem konvensional. Aspek literasi dan kepercayaan terhadap keuangan syariah yang menyertai perubahan ini dibahas lebih lanjut pada pendekatan kuantitatif di bawah.

Selain itu, BSI melalui BSI Halal Center dan kerja sama dengan Kementerian Koperasi, BPJPH, dan KNEKS, menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 1,5 juta pelaku UMKM halal baru pada 2025–2026, dengan total penyerapan tenaga kerja tambahan diperkirakan mencapai 2,3 juta orang. Efek sosial yang dihasilkan dari program ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis usaha halal, penguatan komunitas industri halal, serta tumbuhnya sentra-sentra baru produksi halal di luar Jawa — seperti Aceh, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

2. Pendekatan Kuantitatif : Analisis *Multiplier Effect*

Dalam konteks ekonomi makro, efek berganda dari injeksi fiskal seperti penempatan dana Rp200 triliun dapat diukur menggunakan rumus Keynesian Multiplier, yaitu:

$$k = \frac{1}{1-MPC}$$

di mana k adalah multiplier, dan MPC (*Marginal Propensity to Consume*) adalah proporsi tambahan pendapatan yang dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Bank Indonesia (2024), MPC masyarakat Indonesia berkisar antara 0,72–0,78. Dengan demikian, nilai multiplier berada pada kisaran 3,6–4,5.

Jika digunakan asumsi moderat $MPC = 0,75$, maka nilai multiplier adalah:

$$k = \frac{1}{1 - 0,75} = 4$$

Artinya, setiap Rp1 dana yang disalurkan dapat meningkatkan output ekonomi sebesar Rp4. Dengan demikian, injeksi fiskal sebesar Rp200 triliun berpotensi menghasilkan tambahan output ekonomi sebesar Rp800 triliun terhadap PDB nasional. Dari total efek Rp800 triliun tersebut, berdasarkan proporsi alokasi ke sektor halal dan UMKM (sekitar 40% dari total dana), maka sektor halal berpotensi memperoleh stimulus tambahan sebesar Rp320 triliun. Angka ini jika dikonversi terhadap rata-rata kontribusi industri halal ke PDB (sekitar Rp1.154 triliun pada 2024), berarti penempatan dana ini berpotensi meningkatkan kontribusi industri halal nasional hingga 27–30% dalam dua tahun, dengan catatan bahwa estimasi ini bersifat ilustratif dan bergantung pada asumsi alokasi yang digunakan.

Selain peningkatan output, multiplier effect juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan investasi lanjutan. Berdasarkan model elastisitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan sektor halal (0,35–0,40), peningkatan output Rp320 triliun akan menciptakan sekitar 1,8–2 juta lapangan kerja baru di sektor makanan halal, fashion Muslim, dan kosmetik halal. Efek berantai juga terjadi pada sektor logistik, sertifikasi, dan teknologi digital halal (*halal traceability system*).

Perubahan ini menghasilkan efek trust dan literasi ekonomi syariah yang signifikan di kalangan pelaku usaha mikro. Berdasarkan survei Islamic Finance Literacy Index yang dilakukan OJK (2024) (Aman Santosa, Horas V. M. Tarihoran, Edwin Nurhadi, 2019), tingkat literasi keuangan syariah Indonesia baru mencapai 9,14%, meningkat dari 8,93% pada 2022. Dengan dukungan program penempatan dana dan pendampingan BSI, tingkat literasi tersebut

diproyeksikan naik ke kisaran 11–12% pada akhir 2026, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran publik terhadap sistem keuangan halal yang adil dan inklusif.

3. Integrasi Data dan Simulasi Dampak

Berdasarkan hasil simulasi analisis data dengan menggunakan pendekatan Input–Output Multiplier BPS 2024, diketahui bahwa subsektor makanan dan minuman halal memiliki koefisien pengganda tertinggi, yaitu sekitar 2,43, diikuti oleh subsektor fashion Muslim dengan koefisien 2,11, serta kosmetik dan farmasi halal dengan nilai 1,89. Apabila diasumsikan sekitar 40% dari total penempatan dana 200 triliun rupiah tersalurkan ke ketiga subsektor utama tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional diproyeksikan cukup signifikan.

Melalui skema ini, sektor makanan dan minuman halal berpotensi menghasilkan tambahan output sebesar Rp132 triliun, mencerminkan daya dorong yang besar terhadap rantai pasok bahan baku, distribusi, dan konsumsi domestik. Sementara itu, sektor fashion Muslim diperkirakan mampu menambah output ekonomi sebesar Rp66 triliun, terutama melalui peningkatan kapasitas produksi lokal dan ekspansi pasar ekspor modest fashion Indonesia. Selanjutnya, sektor kosmetik dan farmasi halal diproyeksikan memberikan kontribusi tambahan sebesar Rp54 triliun, seiring dengan meningkatnya permintaan produk perawatan dan obat-obatan halal yang semakin diminati konsumen global.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa alokasi dana ke sektor-sektor industri halal tidak hanya mendorong pertumbuhan output langsung, tetapi juga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing UMKM halal, serta perluasan pasar industri halal Indonesia di tingkat regional maupun global.

4. Kesimpulan Analitis

Dari hasil integrasi metode kualitatif dan kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa penempatan dana sebesar Rp200 triliun pada 2025, apabila didukung oleh peran aktif BSI sebagai lembaga keuangan syariah terbesar, berpotensi menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi sektor riil, UMKM halal, dan industri halal. Dampak positifnya mencakup peningkatan PDB nasional sekitar Rp800 triliun dengan multiplier 4,0, meningkatnya kontribusi sektor halal hingga $\pm 27\text{--}30\%$ atau senilai $\pm \text{Rp}320$ triliun, serta penyerapan tenaga kerja sekitar 2 juta orang. Selain itu, literasi keuangan syariah diperkirakan naik dari 9,14% pada 2024 menjadi sekitar 12% pada 2026, seiring dengan pertumbuhan pembiayaan syariah UMKM oleh BSI yang diproyeksikan meningkat 15–20% per tahun. Dengan demikian, kombinasi penempatan dana dan peran BSI tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan syariah dan pengembangan ekosistem halal secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan dana sebesar Rp200 triliun pada tahun 2025 memiliki potensi signifikan dalam memperkuat sektor riil dan industri halal di Indonesia. Dengan dukungan intermediasi keuangan syariah, khususnya melalui peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI), penempatan dana ini berpotensi tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan likuiditas, tetapi juga katalis bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa apabila dana disalurkan secara produktif melalui mekanisme pembiayaan syariah, dan dengan asumsi marginal propensity to consume (MPC) sebesar 0,75, secara teoretis dapat dihasilkan efek pengganda ekonomi (multiplier effect) hingga empat kali lipat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan asumsi

alokasi tertentu ke sektor halal, simulasi ini memproyeksikan peningkatan kontribusi sektor halal pada kisaran 27–30 persen serta penyerapan sekitar dua juta tenaga kerja baru. Perlu ditegaskan bahwa angka-angka tersebut merupakan proyeksi bersyarat yang sangat bergantung pada asumsi yang digunakan, bukan hasil pengukuran empiris. Efek positif lainnya yang diharapkan meliputi peningkatan literasi keuangan syariah dari 9,14 persen menuju kisaran 12 persen pada akhir tahun 2026, serta peningkatan kapasitas UMKM halal untuk memasuki pasar ekspor global. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pengelolaan keuangan negara dan sistem intermediasi keuangan syariah dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis nilai. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BSI sebagai lembaga keuangan syariah nasional berpotensi menjadi salah satu penggerak pembangunan ekonomi halal, dengan mengintegrasikan pembiayaan, pendampingan, dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Mengingat alokasi yang diterima BSI relatif terbatas dibandingkan total dana, kontribusi tersebut akan optimal apabila disertai dukungan regulasi dan koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, penempatan dana ini dapat dipandang bukan semata sebagai stimulus jangka pendek, melainkan juga sebagai bagian dari fondasi jangka panjang dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Absarihim. (2024). Peran Bank Syariah Sebagai Sumber Alternatif Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal of Islamic Economics and Social*, 2, 117–122. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v2i1.4194>
- Agustinus Rangga Respati, E. D. (2025). BSI Catat Penyaluran Pembiayaan ke UMKM Rp 47,72 Triliun. Retrieved from [kompas.com website: https://money.kompas.com/read/2024/08/21/144100426/bsi-catat-penyaluran-pembiayaan-ke-umkm-rp-47-72-triliun?utm_source](https://money.kompas.com/read/2024/08/21/144100426/bsi-catat-penyaluran-pembiayaan-ke-umkm-rp-47-72-triliun?utm_source)
- Alda Julianti, Lena Hirmawati, & Herlina Yustati. (2024). Strategi Efektif Penggunaan Dana Hibah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 50–61. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.981>
- Aman Santosa, Horas V. M. Tarihoran, Edwin Nurhadi, D. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (snlik). In *Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik i*. Retrieved from [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024/Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan %28SNLIK%29 2024.pdf?utm_source](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%28SNLIK%29%202024.pdf?utm_source),
- Anggela, N. L. (2025). “Kantongi Rp10 Triliun Dana Pemerintah, Begini Rencana Pembiayaan BSI (BRIS).” Retrieved from [finansial.bisnis.com website: https://finansial.bisnis.com/read/20250922/231/1913469/kantongi-rp10-triliun-dana-pemerintah-begini-rencana-pembiayaan-bsi-bris](https://finansial.bisnis.com/read/20250922/231/1913469/kantongi-rp10-triliun-dana-pemerintah-begini-rencana-pembiayaan-bsi-bris)
- ANTARA. (2025). BSI bidik pembiayaan tumbuh 16 persen senilai Rp310 triliun di 2025. Retrieved from [www.antarane.ws.com website: https://www.antarane.ws.com/berita/4878989/bsi-bidik-pembiayaan-tumbuh-16-persen-senilai-rp310-triliun-di-2025?utm_source](https://www.antarane.ws.com/berita/4878989/bsi-bidik-pembiayaan-tumbuh-16-persen-senilai-rp310-triliun-di-2025?utm_source)
- Bsi. (2025). Perbankan Syariah Diprediksi Tumbuh Positif pada 2025, BSI Siap Jadi Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Retrieved from [www.bankbsi.co.id website: https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perbankan-syariah-diprediksi-tumbuh-positif-pada-2025-bsi-siap-jadi-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-nasional?utm_source](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perbankan-syariah-diprediksi-tumbuh-positif-pada-2025-bsi-siap-jadi-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-nasional?utm_source)
- BSI. (2025). Kinerja Solid dan Tumbuh Rerata di atas Industri, BSI Raih Predikat Best Performance Sharia Bank 2025. Retrieved from [www.bankbsi.co.id website: https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-solid-dan-tumbuh-rerata-di-atas-industri-bsi-raih-predikat-best-performance-sharia-bank-2025?utm_source](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-solid-dan-tumbuh-rerata-di-atas-industri-bsi-raih-predikat-best-performance-sharia-bank-2025?utm_source)
- Datu, P. (2025). Pembiayaan Konsumer hingga UMKM Dongkrak Laba BSI di Semester I 2025. Retrieved from [www.kabarbursa.com website: https://www.kabarbursa.com/syariah/pembiayaan-konsumer-hingga-umkm-dongkrak-laba-bsi-di-semester-i-2025?utm_source](https://www.kabarbursa.com/syariah/pembiayaan-konsumer-hingga-umkm-dongkrak-laba-bsi-di-semester-i-2025?utm_source)
- Endah Mudiayatul Kustinah, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Peran Bank Syariah dalam Mendukung

- Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 357–366. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1679>
- Fajahriza, R. F. (2025). Dana Kelolaan Ekosistem Islam BSI (BRIS) Capai Rp13 Triliun per Mei 2025. Retrieved from finansial.bisnis.com website: <https://finansial.bisnis.com/read/20250625/90/1887864/dana-kelolaan-ekosistem-islam-bsi-bris-capai-rp13-triliun-per-mei-2025>
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p11-27>
- IAEI, R. (2025). Indonesia Maintains Third Place in SGIE 2024/2025: Strategic Steps Toward Becoming a Global Islamic Economic Hub. Retrieved from iaei.or.id website: https://iaei.or.id/en/news-and-articles/articles/indonesia-maintains-third-place-in-sgie-2024-2025?utm_source
- Investing. (n.d.). Dana Rp200 Triliun Cair ke Bank Mandiri Hingga BSI. Retrieved from investing.com website: https://id.investing.com/news/stock-market-news/dana-rp200-triliun-cair-ke-bank-mandiri-hingga-bsi-2868586?utm_source
- Kuangan, K., & Indonesia, R. (2025). Pemerintah Hari Ini Mulai Salurkan Dana Rp200 Triliun ke 5 Bank Milik Negara. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia website: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Hari-Ini-Salurkan-200-Triliun>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443. Retrieved from https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan-Eksyar_Preview.pdf
- Kompas. (2025). Dana Rp 200 Triliun di Bank Himbara, Akankah Mudah Terserap Pasar? Retrieved from kompas.id website: <https://www.kompas.id/artikel/dana-rp-200-triliun-di-bank-himbara-akankah-mudah-terserap-pasar>
- Nasrullah, M. (2021). PERAN ZAKAT SEBAGAI PENDORONG MULTIPLIER EKONOMI. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8, 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v8i1.581>
- Oswaldo, I. G. (2025). “3,5 Juta UMKM Ditargetkan Tersertifikat Halal, Ekspor Naik Jadi Rp 1.000 T.” Retrieved from finance.detik.com website: https://finance.detik.com/moneter/d-7755555/3-5-juta-umkm-ditargetkan-tersertifikat-halal-ekspor-naik-jadi-rp-1-000-t?utm_source
- Rahmani, S. (2015). KONSEP LEMBAGA KEUANGAN. *Jurnal Iqtishaduna*, 4(2), 144–162. <https://doi.org/10.2307/2976705>
- Rianti, E. (2025). Kemenkeu Sampaikan Update Realisasi Dana Rp200 Triliun. Retrieved from ekonomi.republika.co.id website: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t3urg9423/kemenkeu-sampaikan-update-realisasi-dana-rp200-triliun?utm_source
- Riswanto, D. R. P., Dr.H. Abubakar, M. P., & Elin Rosalin, M. P. (2018). *ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA*. 40–57. Retrieved from https://repository.upi.edu/39619/2/S_AD_P_1102746_Abstract.pdf
- Sandra Dewi, Yaswirman, Helmi, H. (2023). PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 4(2), 229–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.55336/jpb.v4i2.127>
- Siswanto, D. (2025). Menkeu Purbaya Ungkap Alasan BSI Hanya Dapat Dana Rp 10 Triliun. Retrieved from keuangan.kontan.co.id website: https://keuangan.kontan.co.id/news/menkeu-purbaya-ungkap-alasan-bsi-hanya-dapat-dana-rp-10-triliun?utm_source
- Suheriadi. (2025). BSI Perkuat Pembiayaan UMKM di Indonesia Timur. Retrieved from www.fortuneidn.com website: <https://www.fortuneidn.com/sharia/bsi-perkuat-pembiayaan-umkm-di-indonesia-timur-00-ccw2k-jrcd46>
- Suretno, S., & Al Hidayah Bogor, S. (2022). Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam PERAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 3*,. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di IndonesiaUlfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.
- Yudha, A. T. R. C., & Setiawan, M. R. (2023). Adakah Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Lama Usaha terhadap Pendapatan di IKM Kampoeng Batik, Sidoarjo? *Journal of Economics Development Issues*, 6(1), 47–59. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.156>

